

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan untuk mewujudkan *good governance* pada sektor publik antara lain meliputi penetapan standar etika dan perilaku aparatur pemerintah, penetapan struktur organisasi dan proses pengorganisasian yang secara jelas mengatur tentang peran dan tanggung jawab serta akuntabilitas organisasi kepada publik, pengaturan sistem pengendalian organisasi yang memadai, dan pelaporan eksternal yang disusun berdasarkan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Ashari 2011).

Inspektorat merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Febriansyah dkk 2013).

Menurut (Mardiasmo 2009) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki pengalaman kerja, keahlian, independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Inspektorat daerah merupakan audit internal yang melakukan audit/ pemeriksaan pemerintah dan mempunyai tugas



menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah.

Pengawasan intern di lingkungan Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat untuk kepentingan Menteri/Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kepentingan Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kualitas APIP adalah bagaimana meningkatkan sikap/perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien.

Pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan norma yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP

Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan (Nur Samsi dkk 2013).

Kode Etik APIP dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, salah satu tujuannya adalah mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit. Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas, obyektivitas dan kompetensi. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit; obyektivitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit; serta kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit. Standar umum dalam standar audit tersebut antara lain mengatur tentang independensi APIP dan obyektivitas auditor. Disebutkan dalam standar

umum tersebut bahwa “dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya”. Hal ini mengandung arti bahwa independensi APIP serta obyektifitas auditor diperlukan agar kualitas hasil pekerjaan APIP meningkat.

(Herliansyah dkk dalam Nursamsi dkk 2013) menyatakan bahwa secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu pekerjaan atau tugas (*job*). (Purnamasari dan Asih dalam Nursamsi dkk 2013) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya, mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan, dan mencari penyebab munculnya kesalahan.

Pengalaman kerja berpengaruh terhadap auditor dalam menghadapi objek pemeriksaan dan mengetahui informasi yang relevan, dapat dengan mudah mendeteksi kesalahan dan mencari penyebabnya, sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan dengan teliti, cermat dan cepat (Nursamsi dkk 2015).

Independensi, menyatakan bahwa Auditor APIP harus dalam pelaksanaan tugasnya dengan kriterianya auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Jika independensi atau obyektifitas terganggu, baik secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP (Ashari 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian (Nursamsi dkk 2013) menunjukkan bahwa interaksi independensi dan kepatuhan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Devi 2010) variabel independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan interaksi variabel independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Independensi dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit bersumber dari penelitian (Alim dkk dalam Nursamsi dkk 2013) begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Kharismatuti dan Basuki 2012) menyatakan bahwa interaksi kompetensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Menurut pendapat (Alim dkk 2007 dalam Devi 2010) menunjukkan bahwa komponen kompetensi untuk auditor diindonesia diukur dengan komponen pengetahuan, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, dan kemampuan bekerja sama.

Maka dapat didimpulkan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisif dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama.

Bukan hanya pengalaman kerja, independensi dan kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang auditor tetapi juga rasa pertanggungjawaban atau akuntabilitas serta memiliki etika dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang auditor.

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya (Elisha dan Icuk 2010 dalam Imal 2013). Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris. Sehingga dalam hal ini, kontribusi audit adalah untuk menyajikan akuntabilitas, selama dia memberikan pendapat yang independen, apakah laporan keuangan suatu entitas atau organisasi menyajikan hasil operasi yang wajar dan apakah informasi keuangan tersebut disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan kriteria atau aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa, dengan mematuhi kode etik, memiliki pengalaman kerja yang lama, independensi yang tinggi, rasa

kompetensi dan dapat mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya dapat meningkatkan kualitas audit APIP, dimana dengan kualitas yang baik akan dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan serta terciptanya pemerintahan yang baik pula.

Fenomena yang diperoleh pada Pemerintahan Provinsi Riau terhadap opini yang diberikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagian besar belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Informasi yang diperoleh dari situs BPK menjelaskan, Pemerintah Provinsi Riau termasuk daerah yang LKPD tahun 2010 dilaporkan pada Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I (IHPS I) 2011. Pada IHPS I tersebut LKPD Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan opini WTP, namun opini ini ternyata tidak bertahan pada LKPD Tahun 2011, dimana opini BPK berubah menjadi (Wajar Dengan Penjelasan) WDP (BPK, 2012). Hal ini karena pada audit yang dilakukan oleh BPK mendapatkan temuan yang tidak terdeteksi oleh Inspektorat Provinsi Riau, temuan ini berpengaruh terhadap opini BPK terhadap LKPD. Dari data yang dirangkum, temuan BPK atas LKPD Provinsi Riau Tahun 2011 itu, mencapai Rp1,5 milyar lebih. Milyaran anggaran yang menjadi temuan BPK karena tidak bisa dipertanggungjawabkan itu, terdiri dari 52 item temuan, yang terdapat di sejumlah Satker di lingkungan Pemprov Riau (BPK, 2012).

Fenomena yang disebabkan oleh Perubahan opini BPK dan banyaknya temuan ini menjadikan pertanyaan apakah kualitas audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang dalam hal ini dilaksanakan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inspektorat Provinsi Riau, masih lemah. Seharusnya Inspektorat merupakan pihak yang pertama kali melakukan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seyogyanya dia akan menemukan banyak hal, sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kenyataannya BPK malah menemukan temuan-temuan lain yang sebelumnya tidak terdapat dalam laporan hasil review atau rekomendasi Inspektorat. Disini timbul pertanyaan apakah masih kurang jumlah temuan yang diperoleh pihak Inspektorat, ataukah ketika Inspektorat melakukan review standar yang ditetapkan tidak dipergunakan, atau proses audit yang dilakukan Inspektorat tersebut kurang cermat sehingga tidak menemukan potensi temuan, Selanjutnya apakah ada faktor lain yang mempengaruhi Inspektorat untuk tidak mengungkapkan temuannya, atau mungkin saja ada intervensi terhadap independensinya. Atau bahkan mungkin lingkungan pengendalian Inspektorat sendiri yang tidak mendukung. Adanya intervensi yang dilakukan oleh pimpinan terhadap audit yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Riau juga dapat berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Riau (Ika dkk 2013).

Penelitian ini merupakan replikasi yang mengkombinasikan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nursamsi dkk 2013) dengan judul “ *Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi*” dengan menambahkan satu variabel yaitu variabel independensi auditor. variabel ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh (Atta Putra Harjanto 2014) dengan judul “*Pengaruh Kompetensi, Independensi, Objektivitas, Akuntabilitas, dan Integritas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Auditor Sebagai Variabel Moderasi” perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel objektivitas, integritas dan lokasi penelitian.

Penelitian mengenai kualitas audit penting bagi akuntan publik dan auditor agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkannya. Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini penting yakni untuk menilai sejauh mana para akuntan dapat konsisten dalam menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya. Atas dasar latar belakang diatas, maka penelitian mengangkat judul **“PENGARUH PENGALAMAN KERJA, INDEPENDENSI, KOMPETENSI, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT ETIKA AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERASI” (Studi Empiris Pada Inspektorat Provinsi Riau).**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan didasari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis akan mengadakan penelitian dengan permasalahan “Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Kompetensi, Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderating Pada Inspektorat Provinsi Riau”.

Secara terperinci permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengalaman kerja Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit Secara Parsial Pada Indpektorat Provinsi Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahu Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit Secara Parsial Pada Inspektorat Provinsi Riau.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh Interaksi Pengalaman Kerjadan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Secara Parsial Pada Inspektorat Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Untuk Mengetahu Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit Secara Parsial Pada Inspektorat Provinsi Riau.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh Interaksi Independensi Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Secara Parsial Pada Inspektorat Provinsi Riau.
5. Untuk Mengetahu Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit Secara Parsial Pada Inspektorat Provinsi Riau.
6. Untuk Mengetahui Pengaruh Interaksi Kompetensi Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Secara Parsial Pada Inspektorat Provinsi Riau.
7. Untuk Mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Secara Parsial Pada Inspektorat Provinsi Riau.
8. Untuk Mengetahui Pengaruh Interaksi Akuntabilitas Dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Secara Parsial Pada Inspektorat Provinsi Riau.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini natara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi, kompetensi, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.
 - b. Diharapkan bisa memberikan sumbangsih kualitas auditor sebagai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Inspektorat Provinsi Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan memperkaya hasil penelitian dan sebagai bahan referensi penelitian lain yang ingin meneliti hal yang sama.
- d. Bagi pembaca, peneliti ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan pendidikan.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat digunakan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi para auditor dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas auditnya.
- b. Dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas auditor sehingga dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan untuk peningkatan kualitas audit.

1.4 Sistematika penulis

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini diawali dengan landasan teori, kerangka pemikiran, pandangan islam mengenai audit, tinjauan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.



BAB III:METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan bab metodologi penelitian yang mencakup objek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, teknik analisis data, dan metode pengujian hipotesis.

BAB IV:HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum hasil penelitian untuk setiap hasil penelitian, hasil yang diperoleh dari analisis data serta pembahasan hasil penelitian untuk setiap variabel yang digunakan dalam penelitian.

BAB V:PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari seluruh rangkaian penulis dalam penelitian ini, yang akan mencakup kesimpulan atas hasil penelitian beserta batasan-batasan yang ditemukan dan saran-saran untuk penelitian dimasa yang akan datang untuk penelitian dengan topik yang sama.